

# Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Oleh:

Alfredo Akhsani Wijanarko (202020100104)

Dosen Pembimbing :

Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T

Progam Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

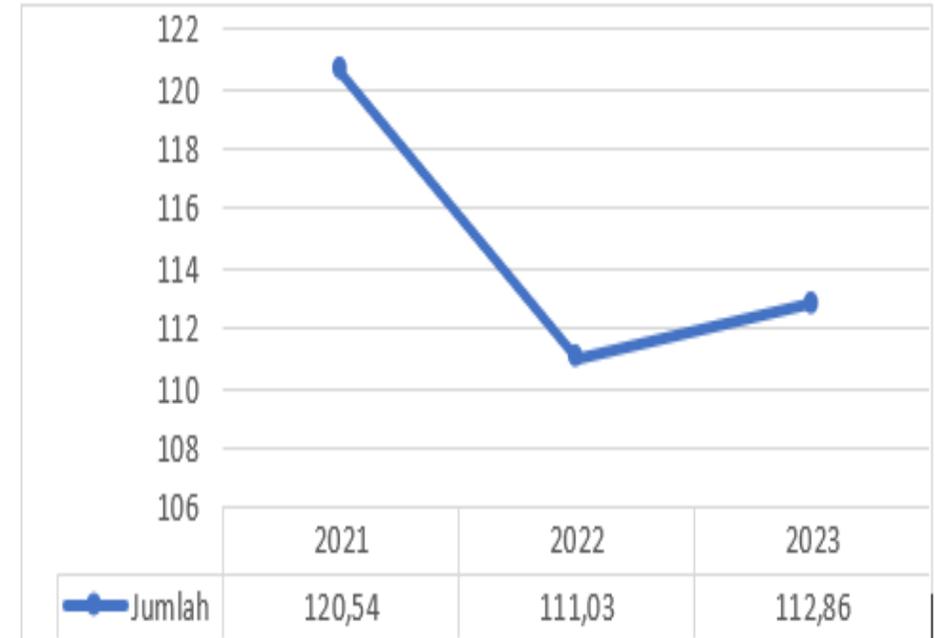
# Pendahuluan

Dewasa ini, permasalahan akan kemiskinan semakin meresahkan dan memprihatinkan. Kemiskinan merupakan isu sosial yang mendapat perhatian utama dari pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari rezim ke rezim beragam upaya telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Fenomena ini mirip dengan penyakit yang sudah parah, tetapi sedang dalam perawatan dan dilakukan eksperimen dalam menyembuhkannya.

# Pendahuluan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angkanya mencapai 120.54 ribu jiwa, menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Namun, terdapat penurunan pada tahun 2022, dengan penurunan menjadi 111.03 ribu jiwa. Meskipun demikian, pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan menjadi 112.86 ribu jiwa.

**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto



**Sumber :** Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

# Pendahuluan

Pemerintah Indonesia tentunya tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Upaya pemerintah untuk memecahkan dan memutus mata rantai kemiskinan sudah didukung oleh banyak regulasi, seperti UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sebagai bagian dari upaya dalam memperbaiki taraf kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu kebijakan yang jadi sorotan utama dan menjadi prioritas utama pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, PKH didesain sebagai sarana strategis untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam rentangan ekonomi yang paling rentan

# Pendahuluan

**Tabel 1.** Data Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Watesnegoro

<u>No</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat</u> ( <u>Jiwa</u> )
1	2021	215
2	2022	270
3	2023	241

Sumber : Diolah Dari Data Koordinator PKH Kecamatan Ngoro

Dari tabel tersebut, jumlah penerima Program Keluarga Harapan di desa watesnegoro mengalami fluktuasi signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah penerima PKH mencapai 215 jiwa. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup mencolok dengan 270 jiwa yang menjadi penerima manfaat. Namun, pada tahun 2023, jumlah penerima PKH mengalami penurunan menjadi 241 jiwa. Dinamika angka penerima manfaat PKH selama tiga tahun ini mencerminkan variasi yang terjadi dalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat selama periode tersebut.

# Gap Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti mengungkap permasalahan yang signifikan, yakni alokasi pemanfaatan dana bantuan yang tidak sesuai. Tercatat bahwa dana bantuan yang semestinya dialokasikan untuk mendukung ranah pendidikan justru diarahkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan program. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penggunaan dana Program Keluarga Harapan, yang akhirnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pencapaian sasaran program, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan di tingkat keluarga penerima manfaat.

# Penelitian Terdahulu

**Penelitian oleh Aditya Prima; 2023**

**“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo”**

**Implementasi PKH di Desa Ganggangpanjang belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan pengurus Program Keluarga Harapan di desa tersebut dalam proses seleksi dan penetapan peserta penerima bantuan.**

**Penelitian oleh Rafika Sulistiana; 2023**

**“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang.”**

**Implementasi PKH di Desa Cipacing berjalan secara memadai, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Elemen pendukung keberhasilan implementasi mencakup ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten.**

**Penelitian oleh Irwan Sukardi; 2019**

**“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.”**

**Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Implementasi PKH belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ialah kurangnya sosialisasi yang merata dan keterbatasan dalam proses pendampingan akibat jarak yang terlalu jauh.**

# Metode



## **METODE**

Deskriptif  
Kualitatif



## **LOKASI**

Ds. Watesnegoro



## **TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**

Teknik Purposive  
Sampling



## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Observasi,  
Wawancara,  
Dokumentasi



## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Reduksi data,  
Penyajian data  
dan Penarikan  
kesimpulan



## **SUMBER DATA**

Data Primer &  
Data Sekunder

# Hasil dan Pembahasan

Peneliti menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle (1980). Menurut Merille S. Grindle keberhasilan Implementasi kebijakan ditentukan oleh 2 variabel yaitu Isi kebijakan dan Konteks kebijakan.

Pada variabel isi kebijakan, Merille S. Grindle menetapkan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu, Kepentingan Yang Mempengaruhi, Tipe Manfaat, Derajat Perubahan, Letak Pengambilan Keputusan, Pelaksana Program dan Sumber Daya Yang Digunakan.

# Isi Kebijakan

## Kepentingan Yang Mempengaruhi

Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), pihak yang memiliki kepentingan melibatkan Koordinator Regional yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan PKH di tingkat regional. Selanjutnya, Koordinator Wilayah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan kinerja Sumber Daya Manusia PKH di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten, terdapat Koordinator Kabupaten dan Kepala Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH dan koordinasi Sumber Daya Manusia PKH di tingkat kabupaten.

Pada tingkat kecamatan terdapat Koordinator PKH Kecamatan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pendampingan PKH di kecamatan. Administrator pangkalan data bertugas untuk menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan data keluarga penerima manfaat PKH di tingkat kabupaten. Kemudian terdapat Pendamping PKH yang berperan dalam mendukung dan membantu Koordinator Kecamatan dalam menjalankan tugas pendampingan PKH, baik di tingkat kecamatan maupun desa

## TIPE MANFAAT

Tabel 2. Bantuan Program Keluarga Harapan Desa Watesnegoro

No	<u>Penerima PKH</u>	<u>Nominal Bantuan</u>
1	Ibu Hamil	600.000
2	Balita	600.000
3	<u>Lansia</u>	480.000
4	<u>Penyandang Disabilitas</u>	480.000
5	Anak SD	180.000
6	Anak SMP	300.000
7	Anak SMA	400.000

Sumber : Diolah Dari Data Koordinator PKH Kabupaten Mojokerto

Didalam pemenuhan hak yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat, terdapat serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi sebelumnya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pada komponen pendidikan, keluarga penerima manfaat diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat sekolah dasar hingga lanjutan dengan minimum kehadiran 85%. Pada komponen kesejahteraan sosial penerima manfaat lanjut usia dan penyandang disabilitas berkewajiban mengkonsumsi makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pada komponen kesehatan, keluarga penerima manfaat memiliki kewajiban untuk menjalani pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, memberikan asupan gizi dan menjalani program imunisasi untuk balita. Langkah-langkah ini diambil dengan harapan dapat mengurangi angka kematian ibu dan balita

## Derajat Perubahan

Derajat perubahan yang diharapkan terjadi pada penerima manfaat ialah terjadinya graduasi. Graduasi adalah berakhirnya kepesertaan keluarga penerima manfaat dalam PKH. Proses graduasi dalam PKH dapat terwujud melalui dua bentuk utama, yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri.

Graduasi alamiah merujuk pada terminasi kepesertaan penerima manfaat dalam program, yang disebabkan oleh ketidakmemenuhannya lagi oleh penerima manfaat terhadap kriteria kepesertaan yang telah ditetapkan.

Pada graduasi sejahtera mandiri mencerminkan kondisi bahwa penerima manfaat mengalami peningkatan ekonomi, sehingga dianggap mampu secara finansial.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Graduasi

Tahun	Graduasi Alamiah (Jiwa)	Graduasi Sejahtera Mandiri (Jiwa)
2022	23	0
2023	18	5

Sumber : Diolah Dari Data Koordinator PKH Kabupaten Mojokerto

## Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran krusial dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini, perlu diuraikan mengenai posisi atau instansi yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang diterapkan. Dalam implementasi kebijakan PKH, titik pusat pengambilan keputusan utama terletak di Kementerian Sosial. Pada tingkat kabupaten, Kepala dinas sosial menjadi sosok kunci yang bertanggung jawab dengan dibantu oleh Kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial.



## Pelaksana Program

Pelaksana program melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran kunci dalam menjalankan kebijakan PKH. Pihak-pihak tersebut terdiri dari

- Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto,
- Koordinator PKH Kabupaten Mojokerto,
- Koordinator PKH Kecamatan Ngoro,
- Administrator Pangkalan Data dan Pendamping PKH Desa Watesnegoro.



Sebelum bertugas pada masyarakat, Koordinator PKH telah mengikuti pelatihan sebelumnya, hal ini guna memastikan bahwa Koordinator & Pendamping PKH memiliki kompetensi yang diperlukan di bidang mereka. Pelatihan ini dirancang untuk mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal.

## Sumber Daya

Pelaksanaan PKH mengandalkan tiga komponen sumber daya yang menjadi pondasi utama bagi keberhasilan implementasi program. Sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga penerima manfaat. Sumber daya manusia yang terlatih dan berkompentensi merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan PKH.

**Tabel 4.** Pengurus Program Keluarga Harapan Desa Watesnegoro

<u>No</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>
1	<u>Koordinator PKH Kecamatan Ngoro</u>	<u>Achmad Qusaeri</u>
2	<u>Administrator Pangkalan Data</u>	<u>Ahmad Syafi'i</u>
3	<u>Sekretaris</u>	<u>Langgeng RJ</u>
4	<u>Bendahara</u>	<u>Ahsanu Farida</u>
5	<u>Pendamping PKH Desa Watesnegoro</u>	<u>Ahsanu Farida</u>

Sumber : Diolah Dari Data Koordinator PKH Kecamatan Ngoro

**Tabel 5.** Data Keluarga Penerima Manfaat & Anggaran PKH Desa Watesnegoro

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat</u> ( <u>Jiwa</u> )	<u>Anggaran PKH Desa</u> <u>Watesnegoro</u>
2021	215	124.550.000
2022	270	184.375.000
2023	241	109.408.368

**Sumber :** Diolah Dari Data Koordinator PKH PKH Kecamatan Ngoro

Pada sumber daya keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi pilar penting dalam menjalankan PKH. Sumber daya keuangan ini digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui rekening masing-masing keluarga penetima manfaat.

**Gambar 2.** Ruang Kerja Koordinator PKH Kecamatan Ngoro



**Sumber :** Hasil olah Peneliti

Sarana dan prasarana menjadi elemen yang tak kalah penting. Kantor Koordinator PKH Kecamatan terletak di Jl. Airlangga No.106, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sarana dan prasarana ini mencakup fasilitas dan perangkat pendukung yang diperlukan untuk mendukung operasional PKH. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan PKH dapat berjalan optimal

# Konteks Kebijakan

Dalam konteks kebijakan, ada tiga indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga, Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana.

## **Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Dalam implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang diterapkan oleh aktor yang terlibat, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Dinas Sosial memiliki kepentingan yang terencana dan terarah dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan PKH.

Kepentingan ini melibatkan beberapa aspek, termasuk pembinaan Sumber daya manusia para Koordinator PKH, dan pengawasan terhadap kinerja Koordinator PKH di setiap wilayah kerja. Pembinaan Koordinator PKH menjadi fokus penting dalam strategi pengendalian dan pengawasan. Melalui pendekatan ini, Dinas Sosial berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PKH.

Pengawasan terhadap hasil kerja Koordinator PKH di setiap wilayah kerja juga menjadi bagian penting dari strategi Dinas Sosial. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, Dinas Sosial dapat menilai kinerja Koordinator PKH pada setiap wilayah kerja.

## Karakteristik Lembaga

Kehadiran institusi atau rezim yang tengah berkuasa memainkan peran signifikan dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Lingkungan di mana suatu kebijakan dijalankan, serta karakteristik lembaga yang terlibat, memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Dinas Sosial menjalankan peran yang bersifat responsif terhadap arahan yang diterima dari Kementerian Sosial, menjadi pelaksana yang tanggap dalam melaksanakan kebijakan nasional ke dalam tindakan konkret di tingkat daerah. Dinas sosial sebagai penyedia layanan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. Fokus utama Dinas Sosial meliputi aspek perlindungan sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial. Dinas sosial berkomitmen untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada kelompok atau individu yang rentan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana

Pada indikator ini menunjukkan bahwa implementor yang menjalankan kebijakan harus memiliki kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat dan konsisten dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaan kebijakan PKH, setiap implementor yang terlibat menunjukkan sikap patuh yang tinggi terhadap ketentuan yang berlaku sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan dari PKH tersebut.

Keaktifan peran para Koordinator PKH pada setiap tingkatan mencerminkan komitmen mereka untuk menjalankan tugas dengan baik dan konsisten. Koordinator PKH sebagai ujung tombak dalam implementasi PKH, menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kesungguhan. Hal ini tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas harian, tetapi juga melibatkan sikap patuh terhadap prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Koordinator PKH akan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas mereka, yang tercermin dalam laporan bulanan yang disampaikan ke Kementerian Sosial dan tembusan ke Dinas sosial.

Gambar 3. Laporan Bulanan Koordinator PKH Kecamatan



Sumber : Diolah Dari Data Koordinator PKH Kecamatan Ngoro

# Kesimpulan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto berjalan dengan baik, namun tantangan serius muncul terkait alokasi pemanfaatan dana bantuan. Keberhasilan program ini dapat terganggu dengan pemanfaatan alokasi dana yang seharusnya difokuskan untuk mendukung tujuan program justru digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan. Kondisi ini menimbulkan sorotan terhadap pentingnya adanya pengawasan dan pemantauan yang lebih cermat dalam Implementasi PKH di Desa Watesnegoro. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang disediakan melalui program ini benar-benar digunakan sesuai dengan fokus program, sehingga hasil yang optimal dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

# Referensi

- [1] Nabilah. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Mojokerto". Al Buhuts E Journal Volume 17 Nomor 2
- [2] La Ode Muhammad Elwan. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Publicuho.
- [3] Riska Rahim Putri. 2023. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
- [4] Badan Pusat Statistik. 2023. Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto.
- [5] B. Setiawati, and M. Tahir. 2022. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 Di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone."
- [6] Masrul Ikhsan, dkk. 2022. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya," Jurnal Administrasi Politik dan Sosial,
- [7] Yosua Mandolang, dkk. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan". E-Journal Unsrat.
- [8] Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- [9]A. Prima, Y. Dwi, and A. R. Ub. 2022. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ganggang Panjang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- [10]R. Sulistiana. 2022. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- [11]Irwan Sukardi and R. Maru. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- [12]Ahmad Fauzi dkk. 2022. Metodologi Penelitian. Pena persada
- [13]Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta bandung.
- [14]Miles and Huberman. 1994. Qualitative Data Analysys. Sage Production Editor
- [15]H Tachjan. 2018. Implementasi Kebijakan Publik. Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad
- [16]Kementrian Sosial RI. 2021. Pedoman Pelaksanaan PKH. Kemensos.go.id

